

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP AKSESIBILITAS MEMPEROLEH PENDIDIKAN UNTUK ANAK-ANAK DI INDONESIA

FACTORS THAT INFLUENCE THE ACCESSIBILITY OF EDUCATION FOR CHILDREN IN INDONESIA

Novrian Satria Perdana

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Bidang Penelitian PAUD, Dikdas, Dikmen, dan Dikmas

Gedung E lantai 19 Komplek Kemdikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan - Jakarta

e-mail: nsp.kemdikbud@gmail.com

Naskah diterima tanggal: 02/02/2015, Direvisi akhir tanggal: 25/10/2015, disetujui tanggal: 10/12/2015

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap aksesibilitas memperoleh pendidikan bagi anak-anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data SUSENAS 2014 dengan unit analisis anak berusia 7-18 tahun, jumlah responden sebanyak 372.142 anak. Penelitian ini menggunakan metode regresi logit dengan software pengolah data STATA 13. Setelah dilakukan olah data dengan menggunakan software STATA 13 dari 372.142 anak diperoleh $\text{Prob} > \chi^2 = 0.0000$, artinya bahwa model yang diujikan dalam penelitian ini signifikan dengan nilai *correctly classified* sebesar 89,93 persen. Dengan demikian, model ini mampu memprediksi aksesibilitas anak memperoleh pendidikan serta variabel terikatnya dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel bebasnya sebesar 89,93 persen. Dapat disimpulkan bahwa anak perempuan yang bertempat tinggal di perkotaan, latar belakang pendidikan Ibu yang semakin tinggi, jarak ke sekolah yang dekat, orang tua yang menikah di usia produktif, semakin besarnya pendapatan per kapita rumah tangga, dan semakin sedikitnya jumlah anggota rumah tangga merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap aksesibilitas memperoleh pendidikan bagi anak-anak di Indonesia.

Kata Kunci: aksesibilitas, faktor internal dan eksternal, pendidikan.

Abstract: The purpose of this study is to determine the factors that influence the accessibility of education for children in Indonesia. This research used SUSENAS data from 2014 and 372,142 children aged 7-18 years as the unit of analysis. This research used the logit regression method with data processing software STATA 13. After using STATA 13 to process data from 372,142 children, the study revealed the following result: $\text{Prob} > \chi^2 = 0.0000$, which indicates that the model tested in this research is correctly classified with a value of 89.93 percent. Thus, this model is able to predict children's access to education. Further, the dependent variable can be influenced by the independent variables as much as 89.93 percent. It can be concluded that factors positively affecting children's access to education in Indonesia are as follows: being female and living in an urban area, having a mother who achieved higher educational levels, living in closer proximity to school, having parents who are married at a productive age, belonging to a household with a higher income per capita and belonging to a household containing a smaller number of members.

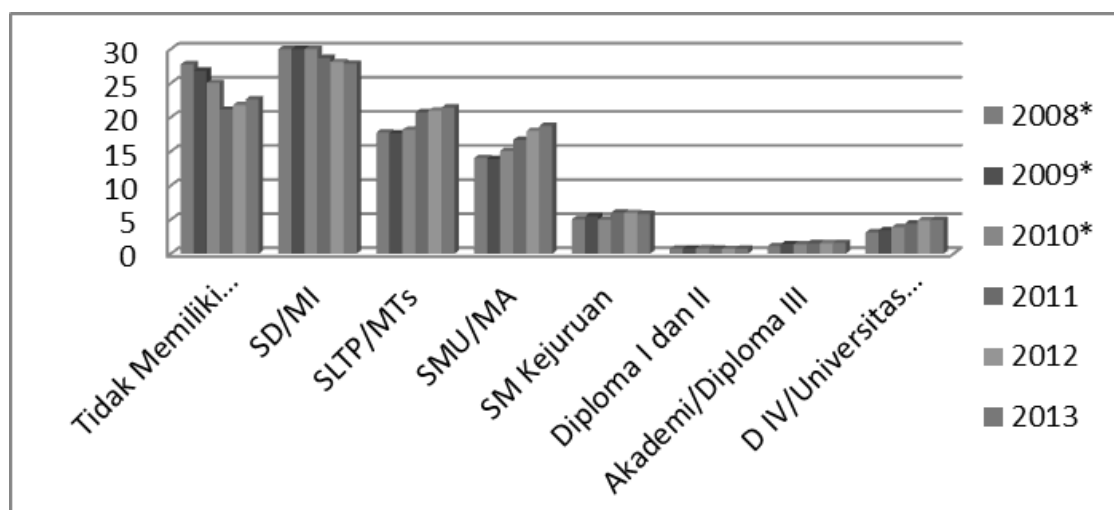
Keywords: accessibility, internal and external factors, education

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Adanya pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Indonesia adalah salah satu contoh negara berkembang dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi namun tingkat pertumbuhan ekonomi masih rendah (Saripudin, 2005). Menurut Bowles dan Gintis dalam Saripudin (2005) rendahnya pertumbuhan ekonomi karena rendahnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat, yang dapat dinyatakan dalam rata-rata lulusan pendidikan masyarakat. Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik tahun 2008-2013 mengenai persentase penduduk Indonesia umur 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang ditamatkan seperti tercantum pada Grafik 1, pada rentang

tahun tersebut lulusan terbesar penduduk Indonesia masih pada jenjang Sekolah Dasar (SD).

Lulusan SD mencapai 30,4 persen, kemudian berturut-turut penduduk yang tidak memiliki ijazah, berijazah lulusan SMP/MTs, lulusan SLTA/MA, lulusan SM Kejuruan, lulusan D IV/Universitas S2/S3, lulusan Akademi/Diploma III dan terakhir lulusan jenjang Diploma I dan II. Selain masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tingkat partisipasi anak untuk bersekolah hingga jenjang perguruan tinggi (PT) masih rendah (sebesar 13,48 persen) dan masih terdapat kesenjangan yang tinggi terkait partisipasi anak untuk bersekolah antarwilayah. Berdasarkan data yang bersumber dari *Indonesia Educational Statistic in Brief* yang dirilis Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemdikbud (2014) hingga saat ini angka partisipasi murni (APM) di daerah perkotaan dan perdesaan dari berbagai jenjang pendidikan di Indonesia hanya mencapai 21,54 persen dan bahkan terdapat kesenjangan hingga mencapai 30,14 persen. APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2008-2013

(*) Persentase Penduduk Indonesia Umur 10 tahun ke Atas

Grafik 1 Persentase Penduduk Indonesia Umur 15 tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2008-2013

anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Masalah lainnya adalah putus sekolah yang mana perkembangan angka putus sekolah (APS) jenjang SD sejak tahun 1998/1999 terus mengalami kenaikan hingga mencapai 25,75 persen, untuk jenjang SMP/ sederajat jumlah putus sekolah mencapai 270.296 siswa pada periode tahun 2011/2012-2012/2013, untuk jenjang SMA dan SMK mengalami kenaikan jumlah putus sekolah hingga mencapai 127.452 siswa SMA dan 171.605 siswa SMK pada periode tahun 2011/2012-2012/2013. Jika dilihat dari periode tahun 1998/1999-1999/2000 hingga periode tahun 2011/2012-2012/2013, kenaikan angka putus sekolah terbesar terjadi pada jenjang SMK, yaitu sebesar 63,78 persen (Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2014).

Adanya berbagai masalah di bidang pendidikan seperti rendahnya jumlah penduduk yang menyelesaikan studi hingga jenjang PT, masih rendahnya APM hingga jenjang PT, masih terdapat kesenjangan APM yang tinggi antarwilayah, masih banyaknya siswa putus sekolah mengindikasikan masih rendahnya aksesibilitas memperoleh pendidikan bagi anak-anak di Indonesia. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap peringkat *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia, karena salah satu indikator IPM adalah pendidikan. Jika berbagai masalah tersebut tidak segera diselesaikan dikhawatirkan dapat menurunkan peringkat IPM Indonesia. Padahal pada saat ini Indonesia sedang memasuki awal dari era bonus demografi dan diharapkan pada tahun 2020-2030 merupakan tahun istimewa karena mendapatkan bonus demografi tersebut. Dalam beberapa tahun ini, berdasarkan data yang bersumber dari *United National Development Program (UNDP)* dalam Pusat Penelitian Kebijakan (2014) peringkat IPM Indonesia mengalami pergerakan yang fluktuatif, yaitu dari tahun 2004 mendapatkan ranking 108, tahun 2005 mendapatkan ranking 107, tahun 2010 mendapatkan ranking 108, dan tahun 2012

mendapatkan ranking 124. Peringkat IPM sering dipakai sebagai pertimbangan oleh negara-negara lain dalam pengambilan keputusan, misalnya terkait penanaman investasi, oleh karena itu apabila pada saat era bonus demografi Indonesia telah tiba, jika tidak segera dilakukan perbaikan berbagai masalah bidang pendidikan maka akan berdampak pada rendahnya produktivitas pekerja dan rendahnya investasi asing untuk Indonesia karena peringkat IPM yang rendah.

Munculnya peluang mendapatkan bonus demografi dapat dijadikan motivasi pemerintah untuk segera memperbaiki kualitas SDM agar dapat meningkatkan peringkat IPM yang merupakan salah satu faktor daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hingga saat ini Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kecerdasan bangsa melalui peningkatan kuantitas SDM yang berkualitas di Indonesia. Upaya tersebut juga tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mana dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi tersebut di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, yang amanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Selain peraturan yang mewajibkan Pemerintah untuk melaksanakan sistem pendidikan yang bermutu dan merata, warga negara Indonesia juga mendapatkan jaminan hak memperoleh pendidikan yang tertuang dalam

Pasal 5 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) yang berbunyi: "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu", yang selanjutnya dipertegas di dalam pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar". Pendidikan dasar yang dimaksud dalam UU ini adalah pendidikan tingkat SD dan sekolah menengah pertama (SMP).

Salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan bangsa menurut UUD 1945 dan peraturan yang ada adalah dengan menjalankan program pendidikan wajib belajar SD yang dimulai pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1993, kemudian ditingkatkan menjadi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dimulai pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2008, dan terakhir dikembangkan menjadi program Pendidikan Menengah Universal (PMU) 12 tahun. Program ini secara bertahap dilaksanakan dengan harapan terwujudnya pemerataan kualitas dan kuantitas pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi yang bermutu serta lebih menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk penduduk di daerah terpencil. Dalam kaitan dengan masih rendahnya aksesibilitas memperoleh pendidikan bagi anak-anak usia 7-18 tahun di Indonesia, maka perlu dicari faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap aksesibilitas memperoleh pendidikan bagi anak-anak di Indonesia untuk mencari alternatif kebijakan agar aksesibilitas memperoleh pendidikan bagi anak-anak di Indonesia terus meningkat hingga jenjang pendidikan menengah.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu 1) Apakah faktor jenis kelamin anak berpengaruh terhadap aksesibilitas memperoleh pendidikan bagi anak-anak di Indonesia? 2) Apakah faktor wilayah tempat tinggal berpengaruh terhadap aksesibilitas memperoleh pendidikan bagi anak-anak di

Indonesia? 3) Apakah faktor latar belakang pendidikan ibu berpengaruh terhadap aksesibilitas memperoleh pendidikan bagi anak-anak di Indonesia? 4) Apakah faktor jarak ke sekolah berpengaruh terhadap aksesibilitas memperoleh pendidikan bagi anak-anak di Indonesia? 5) Apakah faktor usia perkawinan orang tua berpengaruh terhadap aksesibilitas memperoleh pendidikan bagi anak-anak di Indonesia? 6) Apakah faktor pendapatan per kapita rumah tangga berpengaruh terhadap aksesibilitas memperoleh pendidikan bagi anak-anak di Indonesia? dan 7) Apakah faktor jumlah anggota rumah tangga berpengaruh terhadap aksesibilitas memperoleh pendidikan bagi anak-anak di Indonesia?

Ada tujuh hipotesis yang relevan untuk diuji dalam penelitian ini, yaitu 1) Anak laki-laki memiliki probabilitas bersekolah lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak perempuan; 2) Anak yang tinggal di perkotaan memiliki probabilitas bersekolah lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak yang tinggal di perdesaan; 3) Anak dengan latar belakang pendidikan ibu hingga jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi memiliki probabilitas bersekolah yang lebih tinggi jika dibandingkan anak dengan latar belakang pendidikan Ibu hingga jenjang pendidikan dasar; 4) Anak dengan jarak ke sekolah yang dekat memiliki probabilitas bersekolah yang lebih tinggi jika dibandingkan anak dengan jarak ke sekolah yang jauh; 5) Anak dengan orangtua yang menikah pada usia produktif memiliki probabilitas bersekolah yang lebih tinggi jika dibandingkan anak dengan orangtua yang menikah pada usia nonproduktif; 6) Semakin besar pendapatan per kapita rumah tangga maka probabilitas anak untuk bersekolah menjadi lebih tinggi; dan 7) Semakin kecil jumlah anggota rumah tangga maka probabilitas anak untuk bersekolah menjadi semakin besar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang faktor jenis kelamin anak, wilayah tempat tinggal, latar belakang pendidikan ibu, jarak ke sekolah, usia perkawinan orang tua, pendapatan per kapita

rumah tangga, dan jumlah anggota rumah tangga yang berpengaruh terhadap aksesibilitas memperoleh pendidikan bagi anak-anak di Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Pendidikan

Istilah pendidikan adalah terjemahan dari bahasa Yunani, yaitu *Paedagogie*. *Paedagogie* berasal dari kata *pais* yang artinya anak, dan *again* yang artinya pembimbing maka *paedagogie* berarti "bimbingan yang diberikan kepada anak". Dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. (Sudirman dalam Titaley, 2012).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2014), pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara dan pembuatan mendidik. Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam Titaley (2012) adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Dalam memelihara dan memberi laporan diperlukan adanya ajaran, tuntunan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Kemudian definisi pendidikan menurut Pasal 1 UU 20/2013 adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan menurut Dewey dalam Puslitjak (2012) adalah bahwa *education is the process without end*. Hal ini merujuk pada

pengertian pendidikan dalam arti luas. Pendidikan tidak berhenti ketika individu telah mencapai kedewasaan baik jasmani maupun rohani. Selanjutnya, muncul konsep pendidikan seumur hidup (*lifelong education*), yang berarti pendidikan berlangsung seumur hidup atau sampai mati. Merupakan konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan hidup manusia.

Program-Program Pencapaian Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan dirumuskannya tujuan dari penyelenggaraan pendidikan diharapkan terwujudnya potensi peserta didik yang berkualitas dan diharapkan nantinya dapat berpartisipasi dalam pembangunan negara. Sesuai dengan UU 20/2013 setiap orang pada dasarnya memiliki peluang/kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, tidak dibedakan menurut jenis kelamin, wilayah tempat tinggal, strata ekonomi dan sebagainya karena pendidikan adalah untuk semua orang (*education for all*). Untuk meningkatkan kualitas SDM dan mewujudkan tujuan penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah membuat beberapa program kebijakan antara lain program pembangunan sekolah, program penuntasan buta huruf, program wajib belajar, dan program penyetaraan jalur pendidikan.

Program Pembangunan Sekolah (Instruksi Presiden RI Nomor 10, Tahun 1973)

Program ini berjalan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 10, Tahun 1973 tentang program bantuan pembangunan gedung SD. Tujuan kebijakan ini adalah untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan bagi daerah

perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Pelaksanaan tahap pertama program SD Inpres adalah pembangunan 6.000 gedung SD yang masing-masing memiliki tiga ruang kelas. Berjalannya pembangunan ini didukung oleh dana yang cukup karena pada saat itu Indonesia baru saja mendapat limpahan dana penjualan minyak bumi yang harganya naik sekitar 300 persen dari sebelumnya. Uang itu kemudian digunakan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya adalah pendidikan. Pada tahap awal pelaksanaan program SD Inpres, hampir setiap tahun, ribuan hingga puluhan ribu gedung sekolah dibangun.

Program Penuntasan Buta Huruf

Program penuntasan buta huruf dicanangkan pada 16 Agustus 1978. Tekniknya adalah dengan pembentukan kelompok belajar atau "Kejar". Kejar merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi masyarakat yang buta huruf yang berusia 10-45 tahun. Tujuannya adalah agar masyarakat mampu membaca serta menulis huruf dan angka latin. Tutor atau pembimbing setiap kelompok adalah siapa saja yang berpendidikan minimal SD. Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan setiap Kejar bersifat fleksibel. Hingga saat ini program Kejar yang sudah semakin berkembang masih tetap dijalankan. Keberhasilan program Kejar salah satunya terlihat pada angka statistik penduduk buta huruf yang menurun. Pada sensus tahun 1971, dari jumlah penduduk 80 juta jiwa. Indonesia masih memiliki 39,1 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang berstatus buta huruf. Sepuluh tahun kemudian, menurut sensus tahun 1980, persentase itu menurun menjadi 28,8 persen. Hingga sensus berikutnya yaitu pada tahun 1990, angkanya terus menyusut menjadi 15,9 persen. Tambahkan sensus 2000 dan sensus 2010.

Program Wajib Belajar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47, Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, pengertian

wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Wajib belajar ini bertujuan untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program pendidikan wajib belajar dimulai dari program wajib belajar 6 tahun yang dimulai pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1993, kemudian ditingkatkan menjadi pendidikan wajib belajar 9 tahun yang dimulai pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2008, dan terakhir dikembangkan menjadi program Pendidikan Menengah Universal (PMU).

Program Penyetaraan Jalur Pendidikan

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam UU 20/2013 Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pemerintah mengagas jalur pendidikan ini dikarenakan untuk menggapai keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu agar tercapai tujuan pendidikan nasional yang salah satu di antaranya adalah kemudahan mengakses pendidikan agar tercapai pemerataan kualitas dan kuantitas peserta didik di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa jalur pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dalam upayanya untuk mewujudkan pemerataan aksesibilitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia melalui pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Aksesibilitas

Aksesibilitas dapat dianggap sebagai sesuatu yang di luar keberadaan atau availibilitas (ketersediaan) dari sumber daya dalam waktu

dan tempat yang tepat. Termasuk karakteristik dari sumber-sumber yang memberikan peluang atau rintangan/ kendala yang dirasakan oleh klien-klien (pelangan) potensial. Carneiro dalam (Finnie dan Mueller, 2008) memberikan pokok-pokok pikirannya bahwa ada dua perlakuan aksesibilitas, yaitu a) aksesibilitas keuangan yang diartikan sebagai “kemampuan individu”, seperti kemampuan membayar biaya pendidikan (*financial accessibility, defined as the individual ability to pay for education*) dan b) apa saja yang berhubungan dengan aksesibilitas fisik. Kemudian Carneiro mengistilahkan dalam definisinya sebagai transportasi, waktu dan pencarian biaya dalam proses memperoleh kesempatan pendidikan. Dari beberapa definisi, aksesibilitas finansial mengacu pada karakteristik kemampuan masyarakat, dibandingkan dengan faktor-faktor atau sumber-sumber pendidikan lainnya.

Aksesibilitas pendidikan adalah kemudahan yang diberikan kepada setiap warga masyarakat untuk menggunakan kesempatannya dalam memasuki suatu program pendidikan. Akses tersebut dapat berupa sikap sosial yang nondiskriminatif, kebijakan politik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mendukung dan mencegah diskriminasi, tersedianya lingkungan fisik pendidikan yang aksesibel, tersedianya alat bantu belajar/mengajar yang sesuai, dan biaya pendidikan yang terjangkau, yang memungkinkan setiap warga masyarakat menggunakan kesempatannya untuk mengikuti proses belajar/mengajar pada program pendidikan yang dipilihnya.

Teori utama yang mendasari penelitian ini adalah teori Liberal Klasik dari Darwin yang ditemukan pada tahun 1859 Andrew dan Orodho (2014). Menurut teori ini setiap orang dilahirkan dengan jumlah kapasitas tertentu yang untuk sebagian besar diwariskan dan tidak dapat diubah secara substansial. Dengan demikian, sistem pendidikan harus dirancang sedemikian rupa untuk menghilangkan hambatan apa pun termasuk faktor alamiah/takdir anak-anak yang melekat pada dirinya (termasuk latar belakang

ekonomi orang tua, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, geografis/keadaan lingkungan) yang menghambat siswa untuk memperoleh pendidikan. Teori Liberal Klasik menyatakan bahwa mobilitas sosial akan dipromosikan oleh kesempatan yang sama dalam pendidikan. Sumber teori ini dapat juga ditelusuri ke penulis lain yang juga menjadi landasan penelitian ini, yaitu oleh Rousseau (dalam Kainuwa dan Najeemah, 2013) berupa teori Keadilan Sosial, yang menyatakan bahwa faktor “alam” yang melekat pada manusia sejak lahir seharusnya tidak menjadi masalah dalam mendapatkan keadilan sosial terutama dalam memperoleh pendidikan. Di Kenya, *National Rainbow Coalition (NARC)* Pemerintah membuat pendidikan dasar dan pendidikan menengah gratis dan sangat bersubsidi dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi terhadap pendidikan. Teori Liberal Klasik dan teori Keadilan Sosial ditemukan relevan untuk penelitian ini karena faktor “alam” mendiskriminasikan keluarga untuk membuat anak-anak mereka berada di sekolah. Karena hal ini menjadi dampak negatif terhadap pendidikan maka diperlukan kebijakan khusus dari Pemerintah agar seluruh keluarga bisa memperoleh pendidikan dengan mudah.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aksesibilitas dalam Memperoleh Pendidikan

Jenis Kelamin Anak

Saat ini perkembangan penduduk di Indonesia menunjukkan kondisi yang hampir setara antara jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data sensus penduduk yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, dalam kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2012 persentase jumlah penduduk yang terbanyak pada tahun 2009 adalah perempuan kemudian pada tahun 2010 hingga 2012 yang terbanyak adalah berjenis kelamin laki-laki serta selisih di antara keduanya hanya berkisar antara 0,3 hingga 0,7 persen. Data tersebut menunjukkan persentase laki-laki masih mendominasi penduduk di Indonesia, namun

perkembangan penduduk berjenis kelamin perempuan juga turut meningkat. Adanya peningkatan penduduk berjenis kelamin perempuan perlu diimbangi dengan pemberian kesempatan kepada perempuan untuk berkembang dan turut serta dalam pembangunan negara. Upaya memberikan kesempatan tersebut disebut penyetaraan gender. Gender merupakan konsep yang banyak digunakan di berbagai tempat yang menunjukkan perbedaan peran dan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan secara sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Lasfitri (2013) dan Izzaty (2009) menyatakan bahwa jenis kelamin anak mempengaruhi partisipasi sekolah anak-anak, yang mana probabilitas bersekolah anak laki-laki untuk bersekolah lebih kecil daripada anak perempuan. Namun, Ibrahim, Okumu., Alex, dan Isoke (2008) menyatakan bahwa probabilitas bersekolah anak laki-laki di Uganda lebih besar daripada anak perempuan.

Daerah Tempat Tinggal (Perkotaan-Perdesaan)

Upaya Pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan tidak lepas dari faktor kesenjangan antarwilayah, utamanya wilayah perkotaan dan perdesaan. Adanya perbedaan layanan antarwilayah terutama wilayah perdesaan dengan perkotaan dapat menimbulkan kesenjangan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan/bersekolah, di samping karena keterbatasan jumlah sekolah yang tersedia di perdesaan yang menyebabkan keterjangkauan jarak sekolah dari tempat tinggal menjadi lebih jauh, juga karena mayoritas penduduk miskin berada di daerah perdesaan. Penduduk perkotaan relatif lebih mudah mengakses pelayanan pendidikan jika dibandingkan dengan penduduk perdesaan karena jumlah sekolah lebih banyak. Fasilitas pelayanan pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas di daerah pedesaan, terpencil, dan kepulauan masih terbatas, sehingga menyebabkan sulitnya anak-anak untuk memperoleh layanan pendidikan setelah lulus SD. Selain itu, fasilitas dan layanan

pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga belum tersedia secara memadai, terutama di daerah pedesaan, terpencil dan kepulauan. Minimnya fasilitas pendidikan di daerah pedesaan berpengaruh terhadap partisipasi anak-anak dalam memperoleh pendidikan, sehingga Pemerintah perlu segera melakukan percepatan pembangunan fasilitas pendidikan di perdesaan agar tidak terjadi kesenjangan yang tinggi dengan wilayah perkotaan. Penelitian Ibrahim, Okumu., Nakajo Alex, dan Isoke (2008) dan Lasfitri (2013) menyatakan bahwa anak-anak yang tinggal di perkotaan memiliki peluang bersekolah (probabilitas) yang lebih baik (tidak *drop out*) daripada anak yang tinggal di perdesaan.

Tingkat Pendidikan Orang Tua

Partisipasi anak terhadap pendidikan tidak terlepas dari peran dan fungsi orang tua sebagai komponen keluarga inti yang mana di dalamnya diletakkan sendi-sendi dasar pendidikan yang mempengaruhi kepribadian anak. Kepribadian tersebut akan mempengaruhi minat anak untuk bersekolah, melahirkan prestasi di sekolah, berkepribadian baik, dan sebagainya. Keluarga inti merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal yang pertama dan utama dialami oleh anak, serta sebagai lembaga pendidikan yang kodrati, yaitu orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi dan mendidik anak agar berkembang dengan baik. Lingkungan keluarga inti adalah lingkungan pendidikan yang pertama karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan bimbingan dan pendidikan. Dikatakan lingkungan yang utama karena sebagian dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga inti, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima adalah dari keluarga inti yaitu ayah dan ibu. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan cenderung bertambah ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda

akan berpengaruh terhadap cara membimbing belajar anaknya, karena salah satu usaha untuk memperoleh pengetahuan adalah melalui bidang pendidikan, yaitu pendidikan formal. Tingkat pendidikan formal yang diperoleh orang tua akan menentukan banyak tidaknya pengetahuan yang dimilikinya, dan akan berpengaruh terhadap perkembangan potensi yang sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan pendidikan kepada anak-anaknya. Lasfitri (2013), Boit dan Emily (2013), Andrew dan Orodho (2014), Megan (2002), Kainuwa dan Najeemah (2013), Ibrahim dkk. (2008), Mustamin (2013), dan Puslitjak (2012) menyatakan bahwa tingkat pendidikan orang tua terutama ibu dapat mempengaruhi probabilitas anak untuk bersekolah, karena ibu sebagai komponen keluarga inti yang langsung membina keluarganya dapat mempengaruhi pola pikir anak untuk maju serta dapat mendorong anak-anaknya untuk memperoleh pendidikan yang setara atau bahkan lebih tinggi daripada orang tuanya.

Jarak ke Sekolah

Aksesibilitas memperoleh pendidikan dapat dipengaruhi oleh keterjangkauan atau kemudahan untuk menuju sekolah yang dituju dari tempat tinggal. Perbedaan cara untuk menuju ke sekolah seperti naik sepeda motor, bersepeda, dan jalan kaki secara langsung dipengaruhi oleh jarak yang di tempuh menuju sekolah. Jarak tempuh ke sekolah secara langsung berpengaruh terhadap biaya yang harus dikeluarkan orang tua dalam hal pendidikan, selain itu fisik anak untuk melakukan aktivitas setiap hari ke sekolah yang cukup jauh juga menjadi pertimbangan untuk melanjutkan sekolah. Oleh sebab itu, faktor jarak menjadi salah satu latar belakang untuk mengambil keputusan menyekolahkan anaknya hingga jenjang berikutnya. Ibrahim, Nakajo, dan Doreen (2008) menyatakan bahwa semakin jauh jarak siswa ke sekolah maka semakin besar siswa mengalami putus sekolah (*drop out*) dan Puslitjak (2012) menyatakan bahwa jarak ke sekolah bermutu yang dekat akan merangsang

siswa untuk mau bersekolah, sehingga akses mereka terhadap pendidikan lebih baik daripada jarak ke sekolah yang jauh. Dengan demikian, dapat disimpulkan semakin jauh jarak ke sekolah maka probabilitas anak untuk bersekolah akan semakin kecil.

Usia Perkawinan Orangtua

Di berbagai penjuru dunia, pernikahan merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian pernikahan anak. Adanya motif ekonomi, yaitu harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orang tua menyetujui pernikahan usia dini. Alasan orang tua menyetujui pernikahan anak ini seringkali dilandasi pula oleh ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau untuk mempererat tali kekeluargaan. Secara umum, pernikahan dini pada anak lebih sering dijumpai di kalangan keluarga miskin, meskipun terjadi pula di kalangan keluarga ekonomi atas. Di banyak negara, pernikahan anak seringkali terkait dengan kemiskinan. Negara dengan kasus pernikahan anak, pada umumnya mempunyai produk domestik bruto yang rendah. (UNPFA dalam Kainuwa, 2013) Pernikahan anak (dini) membuat keluarga, masyarakat, bahkan negara mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan hal ini tentunya menyebabkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan yang rendah baik anak maupun keluarga dan lingkungannya. Selain pernikahan pada usia dini, pernikahan usia lanjut sangat beresiko bagi pasangan dan keluarganya. Resiko terbesar adalah dalam segi kesejahteraan keluarga yang nantinya akan berpengaruh terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan. Pernikahan dini telah terjadi sejak zaman dahulu yang dibuktikan dengan data SUSENAS 2014 yang menyatakan bahwa terdapat 33 persen masyarakat menikah pada usia di bawah 19

tahun dan usia pernikahan orangtua yang termuda adalah usia 9 tahun. Megan (2002) dan Boit dan Emily (2013) menyatakan bahwa orang tua yang menikah pada usia produktif membuat mereka lebih produktif dalam bekerja agar dapat menghasilkan uang yang lebih banyak sehingga mereka memiliki dana untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang perguruan tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin produktif usia pernikahan orang tua maka semakin tinggi probabilitas anak untuk bersekolah.

Pendapatan per Kapita Orang Tua

Dalam penelitian ini, pendapatan per kapita orangtua yang terbesar adalah sejumlah empat puluh juta rupiah. Berdasarkan hasil *marginal effect after logit*, semakin bertambahnya pendapatan per kapita rumah tangga sebesar satu juta rupiah maka peluang anak untuk bersekolah akan meningkat sebesar 0,008571 kali. Demikian juga sebaliknya, jika pendapatan per kapita rumah tangga berkurang sebesar satu juta rupiah maka peluang anak untuk bersekolah akan menurun sebesar 0,008571 kali. Semakin bertambah pendapatan per kapita orangtua, maka semakin besar peluang anak untuk bersekolah. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang ditulis oleh Andrew (2014), Boit dan Emily (2013), Megan (2002), Ibrahim dkk (2008), Mustamin (2013), dan Puslitjak (2012) yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita orang tua berarti kesejahteraan mereka lebih baik, oleh karena itu mereka akan lebih mudah menyekolahkan anak-anak mereka daripada orang tua dengan pendapatan per kapita yang rendah.

Jumlah Anggota Keluarga

Menurut Todaro dalam Kainuwa dan Najeemah (2013) yang termasuk jumlah anggota keluarga adalah seluruh jumlah anggota keluarga rumah tangga yang tinggal dan makan dari satu dapur dengan kelompok penduduk yang sudah termasuk dalam ke dalam kelompok tenaga kerja. Jumlah anggota rumah tangga sangat

menentukan jumlah kebutuhan keluarga. Semakin banyak ukuran rumah tangga berarti semakin banyak anggota rumah tangga yang pada akhirnya semakin bertambah beban rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, termasuk kebutuhan mengakses pendidikan bagi anak-anak mereka. Mustamin (2013), Kainuwa dan Najeemah (2013), dan Boit dan Emily (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin banyak anggota keluarga maka beban kehidupan mereka akan semakin besar sehingga ber-pengaruh terhadap kesejahteraan mereka termasuk yang seharusnya mereka belanjakan untuk pendidikan anak-anak mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan semakin banyak anggota keluarga maka probabilitas anak untuk bersekolah akan semakin rendah.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2014. Unit analisis dalam penelitian ini adalah anak yang berusia 7 tahun hingga usia 18 tahun dan dipilih responden yang menjawab pertanyaan secara lengkap, sehingga diperoleh sebanyak 372.142 anak. Alasan pengambilan sampel usia 7-18 tahun untuk mengetahui sejauhmana ketercapaian program-program peningkatan akses (hingga jenjang pendidikan menengah) yang dijalankan Pemerintah. Dalam penelitian ini variabel terikat (*dependen variable*) adalah aksesibilitas memperoleh pendidikan bagi anak-anak di Indonesia usia 7-18 tahun di Indonesia. Untuk variabel terikat menggunakan variabel *dummy*, yaitu variabel yang dinyatakan dalam bentuk kode. Untuk *dummy* variabel terikat didefinisikan jika anak memiliki akses memperoleh pendidikan, jika anak masih bersekolah/sudah lulus PT (kode=1), jika anak tidak memiliki akses memperoleh pendidikan, dan jika anak tidak bersekolah lagi (putus sekolah)/tidak/belum pernah bersekolah (kode=0). Batas usia anak adalah 7 tahun hingga 18 tahun. Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini

meliputi jenis kelamin anak (variabel *dummy*, jika laki-laki=1, perempuan=0); Wilayah tempat tinggal (variabel *dummy*, jika tinggal di kota=1, desa=0); Latar belakang pendidikan orang tua (ada dua variabel *dummy*, jika hingga jenjang pendidikan tinggi=1 dan jika hingga jenjang pendidikan dasar=0; dan jika hingga jenjang pendidikan menengah=1 dan hingga jenjang pendidikan dasar=0); Jarak ke sekolah (variabel *dummy*, jika jauh=1, dekat=0); Usia perkawinan orang tua (dalam tahun); Pendapatan per kapita orang tua (dalam juta Rupiah); dan Jumlah anggota rumah tangga (dalam jumlah orang).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif inferensial, yaitu melakukan analisis hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis (Sugiyono dalam Mustamin, 2013). Model yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel terikat (*dependent variable*) yang merupakan *dummy variable* dan variabel bebas (*independent variable*) yang merupakan karakteristik demografi, sosial, pendidikan dan ekonomi rumah tangga. Model diadaptasi dari dua teori, yaitu dari Darwin (1859) dan dari Rousseau serta penelitian Lasfitri (2013), Ibrahim dkk (2008), Puslitjak (2012), Mustamin (2013), Ahmad Kainuwa dan Najeemah (2013), dan Andrew dan Orodho (2014) yaitu:

$$y = \ln \left[\frac{p}{1-p} \right] = \beta_0 + \beta_1 D_{1i} + \beta_2 D_{2i} + \beta_3 D_{3i} + \beta_4 D_{4i} + \beta_5 D_{5i} + \beta_6 X_1 + \beta_7 X_2 + \beta_8 X_3 + e$$

Di mana:

β_0, \dots, β_9 = Parameter model

y = Probabilitas anak memperoleh akses pendidikan (bersekolah/sudah lulus hingga SMA/K/ sederajat) (variabel *dummy*, jika bersekolah/sudah lulus kode=1; dan jika tidak bersekolah/*drop out* kode=0)

D_{1i} = Jenis kelamin anak (variabel *dummy*, jika laki-laki=1, perempuan=0)

D_{2i} = Wilayah tempat tinggal (variabel *dummy*, jika tinggal di kota=1, desa=0)

D_{3i} = Latar belakang pendidikan Ibu (variabel *dummy*, jika tinggi=1 dan dasar=0)

D_{4i} = Latar belakang pendidikan Ibu (variabel *dummy*, jika menengah=1 dan dasar=0)

D_{5i} = Jarak ke sekolah (variabel *dummy*, jika jauh=1, dekat=0)

X_1 = Usia perkawinan orang tua (dalam Tahun)

X_2 = Pendapatan per kapita orangtua (dalam Juta Rupiah)

X_3 = Jumlah anggota rumah tangga (dalam jumlah orang)

e = Error term

Pengujian *Sensitivity*, *Specitivity*, dan *Correctly Classified*

Pada pengujian ini prinsipnya sama dengan uji *goodness of fit* sebagai bentuk perwakilan pengganti R^2 , dengan melihat melalui *specitivity and sensitivity*. *Sensitivity* menunjukkan seberapa besar hasil observasi positif dapat dinyatakan positif secara tepat oleh model, sedangkan *specitivity* menunjukkan seberapa besar hasil observasi negatif dapat dinyatakan negatif secara tepat oleh model. *Correctly classified* menunjukkan seberapa besar kejadian sukses dan kejadian gagal mampu dijelaskan secara tepat oleh model. Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 372.142 anak diperoleh hasil $\text{Prob} > \chi^2 = 0.0000$, nilai *sensitivity* sebesar 100 persen, nilai *specitivity* sebesar 0 persen, dan nilai *correctly classified* sebesar 89,93 persen. Dengan demikian, disimpulkan bahwa model yang diujikan dalam penelitian ini signifikan, hasil observasi dapat dinyatakan secara tepat oleh model dan model tersebut mampu memprediksi partisipasi anak-anak usia 7-18 tahun untuk bersekolah sebesar 89,93 persen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan Bagi Anak-anak di Indonesia dirinci menurut 7 jenis, yaitu menurut jenis kelamin anak, wilayah tempat tinggal, latar belakang pendidikan ibu, jarak kesekolah, usia perkawinan orang tua, pendapatan per kapita orang tua, dan jumlah anggota rumah tangga.

Jenis Kelamin Anak

Berdasarkan hasil dari 372.142 anak terdapat 38.963 anak tidak bersekolah yangmana terdiri dari 22.371 anak laki-laki dan 16.592 anak perempuan yang tidak bersekolah. Berdasarkan nilai *marginal effect after logit*, peluang anak laki-laki untuk bersekolah adalah sebesar - 0,003162. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa peluang anak laki-laki usia 7-18 tahun untuk bersekolah lebih rendah 0,003162 kali daripada peluang anak perempuan untuk bersekolah pada rentang usia yang sama. Tanda negatif menunjukkan arah yang berlawanan. Hasil tersebut tidak sesuai dengan jurnal yang ditulis oleh Ibrahim dkk (2008) yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan di Uganda yangmana anak laki-laki memiliki tingkat partisipasi bersekolah yang lebih baik (tidak *drop-out*) sebesar 51,11 persen daripada anak perempuan. Namun, hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Lasfitri (2013) yang menyimpulkan bahwa peluang anak laki-laki usia 13-18 tahun untuk bersekolah lebih rendah daripada peluang anak perempuan di Jambi.

Keberhasilan Indonesia yang aktif dalam gerakan pengarusutamaan gender sejak tahun 1995 merupakan salah satu upaya menyetarakan peranan laki-laki dan perempuan. Pengarusutamaan bukanlah tujuan, melainkan proses pembentukan pengetahuan dan kesadaran serta pertanggungjawaban bagi semua tenaga profesional pendidikan untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan. Keterlibatan Indonesia dalam gerakan ini adalah dalam Deklarasi Dakar tentang Pendidikan Untuk Semua (*Education for All* atau EFA) tahun 2000, *Beijing Platform for Action* tahun 1995 serta Deklarasi Milenium PBB tahun 2000. Dengan keterlibatan Indonesia dalam konferensi dunia tentang pengarusutamaan gender tersebut secara langsung mendorong kesempatan perempuan Indonesia untuk memperoleh hak mendapatkan pendidikan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan negara.

Banyaknya anak perempuan dalam memperoleh pendidikan juga dimotivasi oleh semakin meningkatnya kebutuhan pekerja sektor formal berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja, pada tahun 2011 dari jumlah 2.167.903 lapangan usaha sebanyak 38 persen yang dibutuhkan adalah pekerja berjenis kelamin perempuan, kemudian pada tahun 2012 dari jumlah 8.926.288 lapangan usaha sebanyak 42 persen yang dibutuhkan adalah pekerja berjenis kelamin perempuan, dan pada tahun 2013 dari jumlah 9.110.647 lapangan usaha sebanyak 45 persen yang dibutuhkan adalah pekerja berjenis kelamin perempuan. Melihat kondisi demikian membuat orangtua menjadi sadar untuk menyekolahkan anaknya agar anak perempuan mereka kelak bisa bekerja mandiri menghasilkan uang sehingga dapat membantu perekonomian keluarganya.

Wilayah Tempat Tinggal

Dari 38.963 anak yang tidak memperoleh akses terhadap pendidikan sebanyak 29.158 anak tinggal di perdesaan dan sebanyak 9.805 anak yang tinggal di perkotaan yang tidak bersekolah. Berdasarkan nilai *marginal effect after logit*, peluang anak untuk bersekolah pada usia 7-18 tahun yang tinggal di perkotaan adalah sebesar 0,027348. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peluang anak untuk bersekolah pada anak usia 7-18 tahun di daerah perkotaan lebih tinggi 0,027348 kali daripada peluang anak pada rentang usia yang sama yang tinggal di daerah perdesaan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ibrahim,dkk. (2008) dan Lasfitri (2013) yang menyimpulkan bahwa anak-anak yang tinggal di perkotaan memiliki peluang bersekolah yang lebih baik (tidak *drop out*) daripada anak yang tinggal di perdesaan. Hal ini terjadi karena hingga saat ini masih terdapat kesenjangan pembangunan fasilitas pendidikan oleh Pemerintah yang mana wilayah perdesaan jauh lebih tertinggal daripada wilayah perkotaan.

Berdasarkan data kondisi fasilitas yang ada di perdesaan yang bersumber dari Badan Pusat

Statistik tahun 2003-2011 mengenai jumlah desa yang memiliki fasilitas pendidikan, menunjukkan bahwa setiap tahunnya peningkatan jumlah desa yang memiliki fasilitas pendidikan yang terbanyak hanya jenjang SD, sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA/SMK kenaikannya hanya berkisar 3 hingga 5 persen per tahun. Rendahnya jumlah desa yang memiliki fasilitas pendidikan ini berpengaruh terhadap aksesibilitas anak-anak dalam memperoleh pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah yang tinggal di daerah perdesaan, sehingga Pemerintah perlu segera melakukan percepatan pembangunan fasilitas pendidikan di perdesaan agar tidak terjadi kesenjangan yang tinggi dengan wilayah perkotaan.

Latar Belakang Pendidikan Ibu

Partisipasi anak untuk bersekolah dipengaruhi oleh peran dan fungsi orang tua sebagai keluarga inti yang di dalamnya diletakkan sendi-sendi dasar pendidikan yang mempengaruhi kepribadian anak. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan cenderung bertambah ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda akan berpengaruh terhadap cara membimbing belajar anaknya. Dari 372.142 anak yang dijadikan sampel penelitian terdapat 38.963 anak yang tidak memperoleh akses terhadap pendidikan, yaitu sebanyak 25.437 anak dengan latar belakang pendidikan Ibu hingga jenjang pendidikan dasar, terdapat 11.339 anak dengan latar belakang pendidikan Ibu hingga jenjang pendidikan menengah, dan terdapat 2.187 anak dengan latar belakang pendidikan Ibu hingga jenjang pendidikan tinggi yang tidak bersekolah. Berdasarkan nilai *marginal effect after logit*, peluang anak untuk bersekolah dengan latar belakang pendidikan ibu hingga jenjang pendidikan menengah sebesar 0,006759 dan peluang anak untuk bersekolah dengan latar belakang pendidikan ibu hingga jenjang pendidikan tinggi sebesar 0,0062137. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa peluang anak untuk bersekolah dengan latar

belakang pendidikan Ibu hingga jenjang pendidikan menengah lebih baik 0,006759 kali daripada peluang bersekolah anak pada rentang usia yang sama dengan latar belakang pendidikan ibu hingga jenjang pendidikan dasar. Selain itu, untuk jenjang pendidikan ibu yang lebih tinggi menunjukkan hasil bahwa peluang bersekolah anak dengan latar belakang pendidikan Ibu hingga jenjang pendidikan tinggi lebih baik 0,0062137 kali daripada peluang bersekolah anak pada rentang usia yang sama dengan latar belakang pendidikan ibu hingga jenjang pendidikan dasar. Dengan kata lain, semakin tinggi jenjang pendidikan orang tua maka semakin tinggi aksesibilitas anak terhadap pendidikan.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lasfitri (2013), Boit dan Emily (2013), Andrew dan Orotho (2014), Megan (2002), Kainuwa dan Najeemah (2013), Ibrahim, dkk. (2008), Mustamin (2013), dan Puslitjak (2012) yang menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan orang tua dapat mempengaruhi partisipasi anak terhadap pendidikan/bersekolah, karena secara tidak langsung dengan tingkat pendidikan orang tua yang tinggi akan mendorong anak-anaknya untuk memperoleh pendidikan yang setara atau bahkan lebih tinggi daripada orangtuanya. Berdasarkan data yang bersumber dari BPS tahun 2008-2013 menunjukkan bahwa sebagian besar latar belakang pendidikan masyarakat adalah lulusan SD/MI, yang belum cukup untuk memberikan bekal ilmu kepada generasi berikutnya (anak) sehingga diperlukan upaya aktif Pemerintah untuk memotivasi dan memfasilitasi orangtua untuk meningkatkan kemampuan mereka di bidang pendidikan hingga perguruan tinggi, seperti adanya program Kejar Paket, Program Pendidikan Jarak Jauh (Sekolah Terbuka) dan sebagainya.

Jarak ke Sekolah

Hasil penelitian menunjukkan dari 38.963 anak yang tidak memperoleh akses pendidikan yang mana terdiri dari 29.793 anak yang tempat

tinggalnya jauh dari sekolah dan sebanyak 9.170 anak yang tempat tinggalnya dekat dari sekolah yang tidak bersekolah. Selain itu berdasarkan hasil perhitungan *marginal effect after logit* diperoleh hasil peluang anak untuk bersekolah pada usia 7-18 tahun dengan jarak ke sekolah yang lokasinya jauh sebesar -0,077361. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peluang anak untuk bersekolah yang jarak lokasi ke sekolah yang jauh lebih rendah 0,077361 kali daripada peluang anak untuk bersekolah dengan jarak ke sekolah yang dekat. Tanda negatif menunjukkan arah yang berlawanan. Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang ditulis oleh Ibrahim,dkk. (2008) yang menyimpulkan bahwa semakin jauh jarak siswa ke sekolah maka semakin besar siswa mengalami putus sekolah (*drop-out*), dan penelitian oleh Puslitjak (2012) yang menyimpulkan bahwa jarak ke sekolah bermutu yang dekat akan merangsang siswa untuk mau bersekolah sehingga akses mereka terhadap pendidikan lebih baik daripada jarak ke sekolah yang jauh.

Kondisi saat ini berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2000-2012 rata-rata jarak terdekat/minimal untuk mengakses pendidikan pada jenjang SD/MI yaitu sejauh 1,12 km untuk daerah perkotaan dan sejauh 2,2 km untuk daerah perdesaan. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs siswa harus menempuh jarak minimal sejauh 2,6 km untuk daerah perkotaan dan minimal sejauh 3,81 km untuk daerah perdesaan. Untuk menempuh jenjang pendidikan SMA/K, siswa harus menempuh jarak minimal sejauh 3,7 km di daerah perkotaan dan minimal sejauh 6,89 km untuk daerah perdesaan. Jarak yang jauh juga dialami siswa yang ingin bersekolah pada jenjang PT harus menempuh jarak minimal sejauh 10,43 km untuk daerah perdesaan dan minimal sejauh 6,71 km untuk daerah perkotaan. Melihat kondisi jarak ke sekolah yang jauh dapat menimbulkan biaya tambahan untuk transportasi, apalagi jarak yang jauh banyak ditemukan di perdesaan sehingga harus segera ditangani secara serius oleh pemerintah

diantaranya membangun gedung sekolah baru yang satu atap yang bermutu, membuka layanan sekolah terbuka yang bermutu, melengkapi fasilitas sekolah, dan sebagainya agar dapat mengatasi masalah rendahnya partisipasi anak untuk bersekolah hingga perguruan tinggi akibat jarak ke sekolah yang jauh dari tempat tinggal.

Usia Perkawinan Orang Tua

Berdasarkan hasil *marginal effect after logit*, peluang anak untuk bersekolah jika orangtuanya menikah pada usia produktif meningkat sebesar 0,159172 kali dan bila orangtuanya menikah pada usia non produktif maka peluang anak untuk bersekolah akan menurun sebesar 0,003174 kali. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang ditulis oleh Megan (2002), Boit dan Emily (2013) yang menyimpulkan bahwa dengan menikah pada usia produktif membuat mereka lebih produktif dalam bekerja agar dapat menghasilkan uang yang lebih banyak sehingga mereka memiliki dana untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang perguruan tinggi.

Kondisi saat ini persentase penduduk yang menikah usia dini masih tinggi yang dibuktikan pada data yang bersumber dari BPS tahun 2009-2012 mengenai persentase usia pernikahan yang menyatakan bahwa pernikahan penduduk pada usia di bawah 19 tahun di perdesaan berkisar antara 45 hingga 55 persen, sedangkan pada rentang usia yang sama di perkotaan berkisar antara 30 hingga 40 persen. Selain tingginya persentase pernikahan usia muda, pernikahan pada usia lanjut juga memiliki persentase yang lebih tinggi. Menikah pada usia non produktif (usia dini/tua) membuat mereka kurang produktif dalam bekerja, sehingga mendapatkan upah yang sedikit dan hal ini dikhawatirkan mengganggu kesejahteraan mereka (menjadi miskin) yangmana akan berimbas pula pada akses terhadap pendidikan anak-anak mereka kelak. Dalam upaya mengatasi hal tersebut, selain membuat regulasi mengenai larangan pernikahan dini. Pemerintah

melalui BKKBN melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk masyarakat di Indonesia mengenai anjuran usia pernikahan yang ideal (berumur 21 tahun) dan bahaya pernikahan dini dan usia lanjut bagi kesehatan reproduksi, psikologis dan kesejahteraan keluarga. Selain itu perlu penguatan peran tokoh adat dan tokoh agama sebagai kontrol sosial, penguatan peran Pemerintah Daerah dalam hal pengendalian pernikahan dini melalui perencanaan kebijakan dan koordinasi lintas sektor secara intensif.

Pendapatan per kapita Orang Tua

Dalam penelitian ini, pendapatan per kapita orangtua yang terbesar adalah sejumlah empat puluh juta rupiah. Berdasarkan hasil *marginal effect after logit*, semakin bertambahnya pendapatan per kapita rumah tangga sebesar satu juta rupiah maka peluang anak untuk bersekolah akan meningkat sebesar 0,008571 kali, begitu juga sebaliknya jika pendapatan per kapita rumah tangga berkurang sebesar satu juta rupiah maka peluang anak untuk bersekolah akan menurun sebesar 0,008571 kali. Dapat pula dikatakan semakin bertambahnya pendapatan per kapita orangtua maka semakin besar peluang anak untuk bersekolah. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang ditulis oleh Andrew (2014), Boit dan Emily (2013), Megan (2002), Ibrahim dkk.(2008) Mustamin (2013) dan Puslitjak (2012) yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita orang tua berarti kesejahteraan mereka lebih baik, oleh karena itu mereka akan lebih mudah menyelesaikan anak-anak mereka daripada orang tua dengan pendapatan per kapita yang rendah.

Berdasarkan data yang bersumber dari BPS tahun 2000-2012, pendapatan per kapita rumah tangga yang terendah ada pada rumah tangga buruh tani dan petani gurem, sedangkan yang tertinggi ada pada rumah tangga bukan pertanian golongan atas di kota. Perbedaan pendapatan per kapita diantara rumah tangga buruh tani hingga mencapai rumah tangga bukan pertanian golongan atas di kota mencapai 18 kali lipat. Dengan pendapatan per kapita yang

rendah akan rentan menjadi miskin. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, saat ini pemerintah meluncurkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat. Melalui program-program ini Pemerintah ingin melindungi dan memberdayakan masyarakat kurang mampu melalui pendekatan teknologi, misalnya simpanan keluarga sejahtera (uang elektronik) bahwa setelah diberikan bantuan dalam bentuk rekening simpanan diharapkan masyarakat dapat menyisihkan atau menggunakan bantuan tersebut untuk kegiatan produktif, seperti sebagai modal usaha. Selanjutnya pada Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan tunai pendidikan hingga lulus SMA/SMK/MA. Selain program KIP, untuk mendukung peningkatan partisipasi anak terhadap pendidikan hingga PT Pemerintah juga masih menjalankan program bantuan dana pendidikan berupa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program Bantuan Siswa Miskin (BSM), program Dana Alokasi Khusus Pendidikan (DAK-Pendidikan), Bantuan Khusus Murid (BKM), Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM), Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Miskin Berprestasi (BIDIKMISI) dan Beasiswa *Olimpiade Sains Internasional (OSI)*, dan sebagainya. Melalui Program Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjamin masyarakat kurang mampu memperoleh manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Jumlah Anggota Rumah Tangga

Berdasarkan hasil observasi, jumlah anggota keluarga minimal adalah 3 orang dan yang terbanyak berjumlah 19 orang. Berdasarkan hasil *marginal effect after logit*, semakin bertambahnya jumlah anggota rumah tangga maka peluang anak untuk bersekolah akan menurun sebesar 0,075926 kali, begitu juga sebaliknya

semakin berkurangnya jumlah anggota rumahtangga maka peluang anak untuk bersekolah akan bertambah sebesar 0,075926 kali. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang ditulis oleh Mustamin (2013), Kainuwa dan Najeemah (2013), dan Boit dan Emily (2013) yang menyimpulkan bahwa semakin banyak anggota keluarga akan beban kehidupan mereka akan semakin besar sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka termasuk yang seharusnya mereka sisihkan untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

Kondisi jumlah anggota rumahtangga di Indonesia saat ini rata-rata jumlah anggotanya bergerak fluktuatif setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2000 dan 2002 berjumlah 3,9 orang dengan jumlah anggota terbanyak pada Propinsi Maluku Utara, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2004 hingga berjumlah 3,7 orang, setelah itu mengalami kenaikan hingga berjumlah 4 orang dalam satu rumahtangga pada tahun 2009 dan kemudian naik kembali menjadi 4,2 orang pada tahun 2013. Berdasarkan tersebut jumlah anggota rumahtangga perlu dipertahankan dalam jumlah maksimal 4 orang untuk menjaga kesinambungan kehidupan mereka agar tercapai kesejahteraan dengan mengakomodir secara adil beban kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, terutama dalam hal pendidikan anak-anak mereka. Dalam hal ini pemerintah perlu melanjutkan kembali program KB dan melakukan penyuluhan hingga ke tingkat rumah tangga dalam upaya mengatasi jumlah angka kelahiran. Selain program KB, pemerintah dapat membantu memberikan fasilitas Rusunawa/Rusunami dengan tarif rendah untuk meminimalkan orang yang bukan masuk dalam keluarga inti yang tinggal dalam satu rumah dan memberikan KUR untuk mereka agar menjadi produktif sehingga tidak membebani anggota keluarga yang lain.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama,

berdasarkan hasil pengolahan data, dari 372.142 anak diperoleh hasil $\text{Prob} > \chi^2 = 0.0000$, dan nilai *correctly classified* sebesar 89,93 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang diujikan dalam penelitian ini adalah signifikan, hasil observasi dapat memprediksi peluang anak usia 7-18 tahun untuk bersekolah sebesar 89,93 persen. Hasil ini menyimpulkan bahwa faktor jenis kelamin anak perempuan, wilayah tempat tinggal di perkotaan, latar belakang pendidikan ibu jenjang pendidikan menengah dan tinggi, jarak ke sekolah yang dekat, usia pernikahan orang tua pada masa produktif, pendapatan per kapita rumah tangga yang semakin besar, dan jumlah anggota rumah tangga yang semakin kecil dapat berpengaruh positif terhadap peluang bersekolah/partisipasi anak usia 7-18 tahun untuk bersekolah, dan hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Darwin (1859) dan Rousseau (1712-1778) serta beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Kedua, berdasarkan nilai *marginal effect after logit*, peluang anak laki-laki untuk bersekolah adalah sebesar -0,003162, artinya bahwa anak laki-laki memiliki probabilitas bersekolah lebih rendah dibandingkan dengan anak perempuan. Ketiga, anak yang tinggal di perkotaan memiliki probabilitas bersekolah yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang tinggal di perdesaan dengan nilai *marginal effect after logit* sebesar 0,027348. Keempat, anak dengan latar belakang pendidikan ibu hingga jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi memiliki probabilitas bersekolah yang lebih tinggi dibandingkan anak dengan latar belakang pendidikan Ibu hingga jenjang pendidikan dasar. Kelima, anak dengan jarak ke sekolah yang dekat memiliki probabilitas bersekolah yang lebih tinggi dibandingkan anak dengan jarak ke sekolah yang jauh dengan nilai *marginal effect after logit* sebesar sebesar -0,077361. Keenam, anak dengan orangtua yang menikah pada usia produktif memiliki probabilitas bersekolah yang lebih tinggi dibandingkan anak dengan orangtua yang menikah pada usia non produktif. Ketujuh, semakin besar pendapatan per kapita rumah

tangga maka probabilita anak untuk bersekolah menjadi lebih tinggi. Kedelapan, berdasarkan hasil observasi, jumlah anggota keluarga minimal adalah 3 orang dan yang terbanyak berjumlah 19 orang, yang mana semakin kecil jumlah anggota rumah tangga maka probabilita anak untuk bersekolah menjadi semakin besar.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka diajukan beberapa saran kebijakan. Pertama, faktor pendapatan per kapita yang rendah berpengaruh terhadap peluang anak usia 7-18 tahun untuk bersekolah dan menyebabkan rumah tangga tersebut rentan miskin. Dalam upaya mengatasi kemiskinan yang berdampak pada partisipasi bersekolah anak usia 7-18 tahun, Pemerintah telah memberikan berbagai macam bantuan dana, namun sering mengalami kendala dalam hal pendataan, penyaluran bantuan, dan sebagainya. Untuk mempermudah kegiatan pendataan warga miskin, pengorganisasian penyaluran bantuan, evaluasi pelaksanaan bantuan, pemberdayaan masyarakat miskin usia produktif dan sebagainya sebaiknya Pemerintah mendirikan Lembaga Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (LPTPK) pada tingkat Kabupaten/Kota yang pembentukan dan pertanggungjawabannya langsung kepada Presiden melalui Bupati/Walikota dan diatur dalam Peraturan Presiden. Kedua, peluang bersekolah anak usia 7-18 tahun yang bertempat tinggal di perdesaan lebih rendah daripada di perkotaan. Oleh karena itu, sebaiknya Pemerintah memperbanyak pembangunan sekolah satu atap (SD, SMP, SMK dan PT) yang terintegrasi dalam satu gedung untuk daerah-daerah perdesaan, daerah terdepan, terluar dan terpecil di Indonesia. Untuk jenjang sekolah menengah (SMK) dan perguruan tinggi (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi dan Akademi Komunitas) difokuskan untuk jurusan yang

sesuai dengan potensi di daerah tersebut agar ilmu yang didapatkan dapat langsung diterapkan. Jika pembangunan gedung sulit direalisasikan karena minimnya jumlah anak bersekolah dan kondisi geografis yang tidak mendukung maka sebaiknya pemerintah menjalankan program Sekolah Keliling (pembelajaran bisa di rumah penduduk/tokoh adat/lokasi tertentu) secara gratis (termasuk peralatan pembelajaran). Selain itu Pemerintah juga perlu mengesahkan/melegalkan dengan cara menyetarakan status sekolah dan ijazah siswa program tersebut agar kelak jika siswa ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya (sekolah formal) di kota lain, mereka tidak perlu mengulang dari awal karena ditolak oleh sekolah lainnya. Ketiga, faktor pendidikan ibu berpengaruh positif terhadap partisipasi anak usia 7-18 tahun untuk bersekolah, oleh karena itu hendaknya Pemerintah menggalakkan program Kejar Paket B, Paket C hingga PT bagi orangtua yang miskin untuk mengakses pendidikan secara gratis. Keempat, tingkat partisipasi anak usia 7-18 tahun untuk bersekolah akan menurun jika jumlah anggota rumah tangga bertambah. Oleh karena itu, hendaknya Pemerintah menggalakkan kembali program Keluarga Berencana yang menitikberatkan pada upaya pembentukan keluarga kecil sejahtera agar tercapai peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan. Selain itu, dalam upaya mengatasi maraknya pernikahan dini maka perlu disusun regulasi mengenai larangan pernikahan dini. Pemerintah melalui BKKBN yang dibantu tokoh adat dan tokoh agama sebagai kontrol sosial sebaiknya lebih giat lagi melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk masyarakat di Indonesia mengenai anjuran usia pernikahan yang ideal (berumur 21 tahun) disertai penjelasan bahaya pernikahan dini dan usia lanjut bagi kesehatan reproduksi, psikologis dan kesejahteraan keluarga.

PUSTAKA ACUAN

- Andrew & Orodho. 2014. Socio-Economic Factors Influencing Pupils' Access to Education in Informal Settlements: a Case of Kibera, Nairobi Country, Kenya. *International Journal of Education and Research*, 2(3), hlm. 1-16.
- Badan Pusat Statistik. 2000-2012. *Rata-rata Pendapatan Perkapita Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan dan Wilayah Tempat Tinggal*. www.bps.go.id, diakses 09 Februari 2015.
- Badan Pusat Statistik. 2003-2011. *Jumlah Desa Yang Memiliki Fasilitas Pendidikan*. www.bps.go.id, diakses 09 Februari 2015.
- Badan Pusat Statistik. 2008-2013. *Persentase Penduduk Indonesia Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Ditamatkan*. www.bps.go.id, diakses 10 Februari 2015.
- Beijing. 1995. *Beijing Declaration and Platform for Action*. <http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing>, diakses 12 Februari 2015.
- Boit & Emily. 2013. Factors influencing household decisions on access to Primary School education in Kenya: Case Study of Uasin Gishu West District. *International Journal of Academic Research in Bussiness and Social Sciences ed, July 2013*, 3(7), hlm. 163-173.
- Finnie & Mueller. 2008. *The Effects of Family Income, Parental Education, and Other Background Factors on Access to Post-Secondary Education in Canada: Evidence from the YITS*. Toronto, ON: Canadian Education Project. (www.mesa-project.org/research.php), diakses 15 Februari 2015.
- Ibrahim, O., Nakajo A., & Doreen, I. 2008. Socioeconomic Determinants of Primary School dropout: The Logistic Model Analysis. Uganda: *Journal of Economic Policy Research Centre. Research Series*, (54), hlm. 1-28.
- Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung SD
- Izzaty. 2009. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Sekolah Anak Jenjang SMP dan SMA di Sumatera Barat. *Tesis*. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2014. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kainuwa & Najeemah. 2013. Influence of Socio-Economic and Educational Background of Parents on Their Children's Education in Nigeria. *International Journal of Scientific and Research Publication*. (3), hlm. 1-8.
- Kemdikbud. 2012. *Analisis Kebijakan Tentang Akses Pendidikan Dasar Bermutu untuk Masyarakat Daerah Yang Termarjinalkan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan.
- Lasfitri. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Sekolah di Propinsi Jambi. *Tesis*. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.
- Megan. 2002. The Effect of Family, Social and Background Factors on Their Children's Educational Attainment. *International Journal of Business and Commerce: Papper* 8.
- Mustamin, St.H. 2013. Faktor-faktor Pengaruh Tingkat Pendidikan Anak di Pemukiman Kumuh di Kota Makasar. *Tesis*. Universitas Hasanudin, Makasar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan. 2014. *Indonesia Educational Statistics in Brief 2013/2014*.

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Saripudin. 2005. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Terhadap Kualitas Pendidikan. *Tesis*. Universitas Indonesia, Depok.

Stalker, P. 2008. *Laporan Millenium Development Goals Tahun 2000*. Cetakan Kedua: Bappenas dan UNDP.

Titaley, M. E. 2012. Faktor-faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di SMPN 4 dan SMP Taman Siswa Jakarta Pusat. *Tesis*. FISIP Universitas Indonesia, Depok.

The World Education Forum. 2000. *Deklarasi Dakar tentang Pendidikan Untuk Semua (Education for All atau EFA) tahun 2000*. Senegal. www.idp-europe.org, diakses 20 Februari 2015.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003.

